

Rencana Strategis

Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

2025-2029





KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I
TAHUN 2025 – 2029

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini kami susun sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Renstra BP3KP Papua I Tahun 2025–2029 merupakan penjenjangan dari Rencana Strategis di masing-masing Unit Organisasi yang merupakan penurunan dari Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga merupakan tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sesuai Undang- Undang Nomor 17 tahun 2007 serta merupakan tahapan pertama dari RPJPN 2025-2045 sesuai Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024.

Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I disusun sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pemograman (RENJA), penganggaran (RKA-KL), serta perjanjian kinerja dan evaluasi serta pelaporan kinerja (PK dan LAKIP) kegiatan pembangunan perumahan yang bersifat multisektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, swasta dan masyarakat.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat mencapai target yang tertuang di dalam Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I ini dengan sebaik-baiknya.

Jayapura, 9 Februari 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Papua I



Mickhael Nicolas Demena, S.T., M.T.
NIP. 198008132003121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	7
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	11
2.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.....	11
2.2 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	17
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi.....	17
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.....	22
3.3 Kerangka Kelembagaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.....	24
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	30
4.1 Target Kinerja	30
4.2 Kerangka Pendanaan.....	32
BAB V PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Total Capaian Pembangunan Perumahan di Provinsi Papua Tahun 2020-2024	2
Tabel 1. 2 Rincian Capaian Pembangunan Perumahan di Provinsi Papua tahun 2020-2024	3
Tabel 1. 3 Luas Wilayah Kerja pada Kabupaten/kota di BP3KP Papua I	6
Tabel 1. 4 Data Backlog Perumahan di BP3KP Papua I	10
Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan pada Balai P3KP Papua I Tahun 2025-2029.....	12
Tabel 2. 2 Sasaran Kegiatan BP3KP Papua I Tahun 2025-2029	15
Tabel 3. 1 Komposisi sumber daya manusia (SDM) di Balai P3KP Papua I.....	28
Tabel 3. 2 Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan pada BP3KP Papua I.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	4
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	25
Gambar 3. 2 Bagan Struktur Organisasi BP3KP Papua I.....	27
Gambar 3. 3 Diagram Pegawai BP3KP Papua I Berdasarkan Satuan Kerja dan Pendidikan.....	28

BAB I

PENDAHULUAN



RENCANA STRATEGIS

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PAPUA I**

TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua I merupakan salah satu unit kerja yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

Pada periode 2020-2024, urusan pemerintahan di bidang perumahan masih berada di bawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua I terbentuk berdasarkan Permen PUPR Nomor 26 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan merupakan Unit Pelaksana Teknis dengan wilayah kerja di Provinsi Papua. Dalam melaksanakan tugas, BP2P Papua I bertugas melakukan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di wilayah Papua pada tahun 2020-2022, dan bertugas pada daerah otonom baru (DOB) tahun 2023-2024 dengan lingkup provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. Program yang dilaksanakan pada BP2P Papua I yaitu program pembangunan perumahan sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Perumahan, dengan penyusunan laporan kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2020-2024.

Setelah reorganisasi BP2P Papua I berganti menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I (BP3KP Papua I), yang terbentuk pada tahun 2025 bersama dengan 19 Balai lainnya di seluruh Indonesia. BP3KP Papua I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dan mempunyai hubungan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Adapun capaian kinerja BP2P Papua I tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Rumah Susun sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) Unit;
- Revitalisasi Rumah Susun sebanyak 20 (dua puluh) Tower; dan
- Pembangunan Rumah Khusus di daerah maritim/nelayan dan pulau terluar adalah sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) unit;
- Revitalisasi Rumah Khusus di daerah maritim/nelayan dan pulau terluar adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) unit;
- Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 19.886 (Sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam) unit.
- Bantuan PSU Rumah Umum sebanyak 2.502 (dua ribu lima ratus dua) unit.

Total capaian pembangunan perumahan di Provinsi Papua tahun 2020-2024 dalam mendukung penyediaan perumahan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

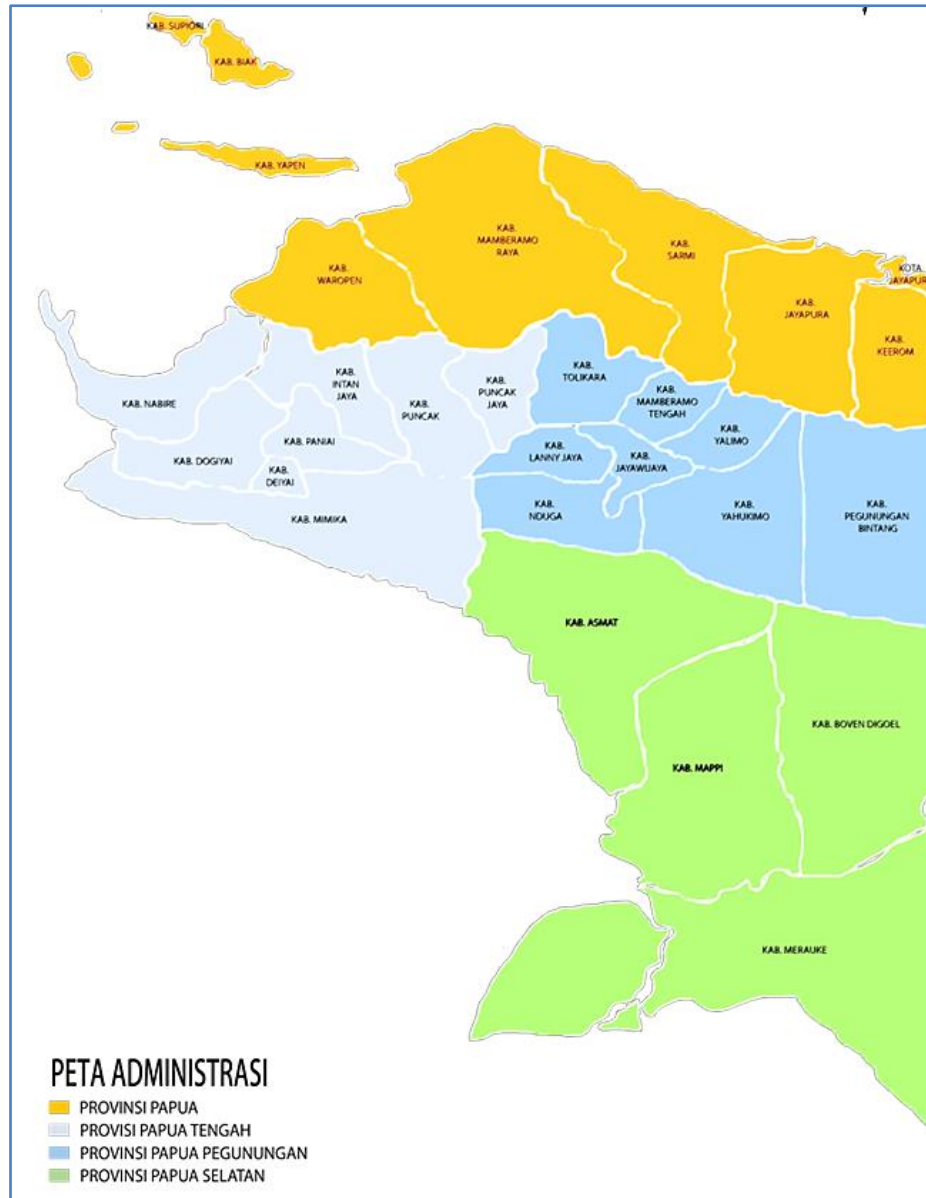
Tabel 1. 1 Total Capaian Pembangunan Perumahan di Provinsi Papua Tahun 2020-2024

No.	Program	Capaian					Total		
		2020	2021	2022	2023	2024	UNIT	TB	LOK
1.	Pembangunan Rumah Susun	86 Unit	157 Unit	157 Unit	88 Unit	132 Unit	620	-	-
2.	Revitalisasi Rumah Susun	1 Tower	13 Tower	1 Tower	3 Tower	2 Tower	-	20	-
3.	Pembangunan Rumah Khusus	140 Unit	159 Unit	94 Unit	1 Unit	-	394	-	-
4.	Revitalisasi Rumah Khusus	-	-	-	52 Unit	-	52	-	-
5.	Fasilitasi Rumah Swadaya	6.120 Unit	1.814 unit	2.847 Unit	4.823 Unit	4.282 unit	19.886	-	-
6.	Bantuan PSU Rumah Umum	-	395 Unit	546 Unit	801 Unit	760 unit	2.502	-	-

Adapun rincian capaian pembangunan perumahan di Provinsi Papua tahun 2020-2024 dalam mendukung penyediaan perumahan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2 Rincian Capaian Pembangunan Perumahan di Provinsi Papua tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target Rentra	Realisasi	Capaian (%)	Target Rentra	Realisasi	Capaian (%)	Target Rentra	Realisasi	Capaian (%)	Target Rentra	Realisasi	Capaian (%)	Target Rentra	Realisasi	Capaian (%)
Kegiatan : Penyediaan Akses Perumahan Yang Layak dan Aman															
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Ketersediaan Rumah yang Layak Huni															
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	1 laporan	33,33	3 laporan	1 Laporan	33,33	3 laporan	2 Laporan	66,66
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	6.120 unit	6.120 unit	100	2.550 unit	1.814 unit	71,14	3.670 unit	2.847 unit	77,57	5.490 unit	4.823 unit	87,85	6.430 unit	4.282 unit	77,99
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	86 unit	86 unit	100	173 unit	157 unit	90,75	277 unit	157 unit	56,58	345 unit	88 unit	25,51	293 unit	132 unit	45,05
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	1 tower	1 tower	100	3 tower	13 tower	433,33	9 unit	1 tower	11,11	10 tower	3 tower	30,00	8 tower	2 tower	25,00
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	134 unit	134 Unit	100	391 unit	159 unit	40,66	440 unit	94 unit	21,36	458 unit	1 unit	0,22	440 unit	-	0,00
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 unit	100	- unit	-	0,00
Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	-	-	-	500 unit	395 unit	79,00	688 unit	546 unit	79,36	875 unit	801 unit	91,54	1.111 unit	760 unit	72,27
Kegiatan : Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan															
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan															
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 layanan	1 layanan	100	1 layanan	1 layanan	100	1 layanan	1 layanan	100	1 layanan	1 layanan	100	1 layanan	2 layanan	200
Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100	1 layanan	1 layanan	100	1 layanan	1 layanan	100	1 layanan	1 layanan	100	1 layanan	2 layanan	200



Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dalam melaksanakan tugasnya memiliki 4 (empat) wilayah kerja yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua terdiri dari 9 kabupaten/kota. Luas wilayah Provinsi Papua adalah 82.680,95 km² dengan Ibukota yaitu Kota Jayapura. Menurut BPS Provinsi Papua, pada tahun 2025 Papua memiliki 1.073,6 ribu jiwa penduduk dengan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 4,11% dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 73,83%. Papua terdiri dari 107 kecamatan dan 1.029 kampung, dengan suhu iklim terendah 20,09°C dan suhu udara tertinggi yaitu 37,30°C. Bencana alam yang tercatat pada Provinsi Papua tahun 2024 adalah banjir sebanyak 3 kali di Kabupaten Jayapura, 1 kali di kota Jayapura, 1 kali di Kabupaten Keerom dan 1 kali di kabupaten Waropen. Gelombang

pasang/Abrasi terjadi 1 kali pada Kabupaten Waropen dengan 20 kampung terendam. Gempa bumi dan longsor terjadi di Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Sarmi, Waropen dan Kota Jayapura.

Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari 8 kabupaten, yang pada tahun 2024 tercatat memiliki 252 distrik dengan 2.634 kampung/kelurahan, dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 51.213,330 km². Berdasarkan Stasiun Meteorologi Wamena Jayawijaya, suhu udara Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 berkisar antara 12,30°C sampai dengan 30,50°C. Tahun 2025 penduduk Provinsi Papua Pegunungan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.484,86 ribu jiwa, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk yang tercatat pada tahun 2024 sebesar 1,29%. Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Papua Pegunungan adalah sebesar 54,43%, hal ini tergolong rendah dan tidak mencapai IPM Indonesia sebesar 75,02%. Bencana alam yang tercatat adalah tanah longsor yang terjadi pada tahun 2024 di kabupaten Yahukimo dan Pegunungan Bintang. Banjir juga pernah terjadi di kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo dan Pegunungan Bintang, sedangkan gempa bumi tercatat hanya pernah terjadi di Yalimo.

Provinsi Papua Tengah terdiri dari 8 kabupaten, yang pada tahun 2024 tercatat memiliki 131 distrik dan 1.208 kampung/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 61.072,91 km². Tahun 2025, penduduk Provinsi Papua Tengah memiliki jumlah penduduk sebesar 1.492,28 ribu jiwa, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk yang tercatat pada tahun 2024 sebesar 1,31%. Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Papua Tengah adalah sebesar 60,25%, hal ini tergolong rendah dan tidak mencapai IPM Indonesia sebesar 75,02%. Suhu terendah terjadi di Stasiun Meteorologi Enarotali sebesar 11,20°C, sedangkan suhu tertinggi terjadi di Stasiun Meteorologi Mozez Kilangin yaitu 36,10°C. Pada tahun 2024 bencana alam yang terjadi adalah banjir, di wilayah kabupaten Mimika, Dogiyai, Nabire, Paniai, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya dan gempa bumi terjadi di kabupaten Mimika, Deiyai dan Paniai. Tercatat pada data BPS Provinsi Papua Tengah bahwa terjadi tanah longsor di beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Mimika, Dogiyai, deiyai, Paniai, Intan Jaya dan Puncak Jaya.

Provinsi Papua Selatan terdiri dari 4 kabupaten, yang terdiri dari 690 kampung/kelurahan dan 82 distrik dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 117.849,16 km². Tahun 2025, penduduk Provinsi Papua Tengah memiliki jumlah penduduk sebesar 542,1 ribu jiwa, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk yang tercatat pada tahun 2024 sebesar 4,55%. Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Papua Selatan adalah sebesar 68,86%. Berdasarkan data stasiun Meteorologi Mopah, suhu udara Provinsi Papua Selatan tahun 2024 berkisar antara 21,17°C sampai dengan 27,19°C. (*BPS, Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua tengah Dalam Angka 2025*)

Tabel 1. 3 Luas Wilayah Kerja pada Kabupaten/kota di BP3KP Papua I

Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)
Papua	Jayapura	14,082.21
	Kepulauan Yapen	2,429.03
	Biak Numfor	2,257.78
	Sarmi	14,068.37
	Keerom	9,526.32
	Waropen	10,778.76
	Supiori	660.61
	Mamberamo Raya	28,042.39
	Kota Jayapura	835.48
Papua Pegunungan	Nduga	5,886.89
	Jayawijaya	2,629.01
	Lanny Jaya	2,339.78
	Tolikara	2,990.01
	Mamberamo Tengah	4,101.50
	Yalimo	3,148.29
	Yahukimo	16,365.94
	Pegunungan Bintang	13,751.92
Papua Tengah	Mimika	18,298.95
	Dogiyai	3,792.93
	Deiyai	2,846.41
	Nabire	11,806.09
	Paniai	5,306.87
	Intan Jaya	5,334.45
	Puncak	7,701.03
	Puncak Jaya	5,986.19
Papua Selatan	Merauke	45,013.35
	Boven Digoel	23,558.27
	Mappi	24,262.23
	Asmat	25,015.31
Total Luasan Wilayah		312,816.37

Sumber: BPS Provinsi Papua

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam penyelenggaraan perumahan rakyat terdapat potensi dan permasalahan terutama pertumbuhan penduduk Indonesia yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun dan menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru juga akan semakin meningkat. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I berperan sebagai pelaksana perwujudan perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, terjangkau, berkelanjutan dan berlandaskan gotong royong melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berperan sebagai regulator, fasilitator, dan operator yang membuka jalan, mengatur ekosistem, serta mendorong inovasi dalam mewujudkannya. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan penduduk yang meningkat. Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif ditambah rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR baik membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya MBR yang belum tinggal di rumah layak huni. Hal tersebut berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan permukiman kumuh baru. Terlebih dalam pembangunan perumahan khususnya di area perkotaan (*urban area*) yang terkendala dengan proses pengadaan lahan.

Terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan perumahan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) baik di lingkup BP3KP Papua I maupun pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk peningkatan keterampilan tukang dan tenaga kerja lokal guna mendukung kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan berkualitas khususnya di daerah pedesaan;
- b. Menjalin kolaborasi lintas sektor dan peran aktif pemerintah daerah dalam hal pendataan dan mengakselerasi pelaksanaan program pembangunan perumahan;
- c. Mensinergikan program antara pemerintah pusat, daerah dan BUMN/CSR dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman;
- d. Mendorong keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema kerja sama dengan pemerintah dan Badan usaha;
- e. Menjalin kemitraan dan kolaborasi antarinstansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PPN/Bappenas, dan instansi pemerintah lainnya dalam rangka integrasi data sektoral bidang perumahan ke dalam

sistem nasional dan memperkuat peran dalam kerangka pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Permasalahan secara umum yang dihadapi pada saat ini terkait perumahan di Indonesia adalah tidak sesuainya jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinnya serta ketimpangan kualitas lingkungan permukiman di daerah perkotaan dan perdesaan. Beberapa permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I diantaranya sebagai berikut:

- a. Kondisi lahan yaitu keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Kota Jayapura, terdapatnya lahan eksisting rencana pembangunan yang belum siap seperti kondisi lahan masih memerlukan pematangan lahan terlebih dahulu dan akses menuju lokasi yang sulit dan berkas legalitas tanah (surat kepemilikan tanah) yang tidak dimiliki dan lebih banyak menggunakan keterangan hak ulayat/pelepasan tanah adat.
- b. Layanan dasar kurang memadai dan belum terintegrasi di wilayah perdesaan sehingga menimbulkan ketidaklayakan yang mengurangi kualitas hidup penghuni, yaitu masih banyaknya permukiman tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh dengan kepadatan tinggi, sanitasi buruk, akses air bersih minim, serta konstruksi bangunan tidak memenuhi standar teknis dan kesehatan. Seperti desa yang aksesnya jauh dari kota sehingga sulit dijangkau, jalanan rusak dan juga keamanan daerah tertentu yang sulit diakses.
- c. Kualitas rumah dan Kawasan permukiman, masih tingginya angka *backlog* kepemilikan dan kepemilikan serta jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).
- d. Kurangnya koordinasi antar sektor dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan menyebabkan program perumahan kurang efektif atau tidak tepat sasaran. Sehingga, menyebabkan kurangnya data dan sistem informasi yang akurat sehingga menghambat proses Perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan perumahan.
- e. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan menjadi kendala signifikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan organisasi. Kondisi ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja bagi pegawai yang masih terbatas, sehingga menghambat produktivitas dan kualitas kerja.
- f. Proses lelang yang cukup lama sehingga mengundurkan jadwal pelaksanaan pembangunan.
- g. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan diantaranya adanya protes/ penolakan masyarakat sekitar lokasi terhadap pekerjaan pembangunan (kebisingan, keamanan lingkungan, dsb.) hal ini juga menyebabkan konflik sosial/ politik yang berakibat pada pemalangan pekerjaan sehingga mengakibatkan mundurnya waktu pelaksanaan pekerjaan karena banyaknya intervensi dari pihak eksternal yang

menghambat pelaksanaan pembangunan juga kurangnya keswadayaan dan kemauan masyarakat dalam bergotong-royong.

- h. Pekerjaan tidak selesai tepat waktu dikarenakan Keterbatasan tenaga kerja tukang dan material di lapangan baik kuantitas maupun kualitas, Keterbatasan jaringan listrik dan air di daerah pembangunan perumahan khususnya didaerah pedesaan, Keterbatasan bahan dan material bangunan di lokasi pembangunan perumahan, Keterbatasan jumlah tenaga fasilitator lapangan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik sipil/arsitektur, Kondisi cuaca buruk yang menghambat jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- i. Berkas kelengkapan serah terima aset yang belum lengkap sehingga menghambat proses serah terima aset.

Adapun Tantangan Jangka Menengah (*Risks/Threats*) yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I diantaranya sebagai berikut:

- a. Biaya logistik tinggi, keamanan yang kondusif di daerah tertentu, dan sebaran permukiman yang terpencar.
Pembangunan di wilayah Papua Pegunungan menghadapi tantangan berupa tingginya biaya dan risiko keamanan. Tanpa dukungan sistem logistik yang memadai serta pendekatan pengembangan berbasis klaster, pencapaian target jumlah unit maupun mutu hasil pembangunan berpotensi mengalami penurunan.
- b. Perubahan tata ruang dan konflik tenurial/adat.
Sebagian besar kampung berada dalam kawasan hutan atau wilayah lindung, maka tanpa adanya pemetaan partisipatif serta penyesuaian yang selaras dengan RTRW, pelaksanaan proyek perumahan dan permukiman berisiko menimbulkan sengketa lahan maupun ketidaktepatan penentuan kebutuhan PSU.
- c. Ketergantungan pada data yang tidak seragam berisiko tidak tepat sasaran.
Jika pemda terlambat memperbarui data backlog/RTLH dan luasan kumuh (SK lokasi, RP2KPKP), alokasi BSPS dan penanganan Kawasan kumuh bisa tak tepat sasaran.
- d. Urbanisasi cepat di kantong ekonomi perkotaan.
Tekanan perkembangan permukiman di kawasan lereng, sempadan air, maupun wilayah pesisir seperti kampung di atas air memerlukan penerapan desain yang adaptif meliputi rumah panggung, sistem proteksi kebakaran, dan drainase yang memadai agar tidak memicu terbentuknya kawasan kumuh yang baru.

Backlog Perumahan di BP3KP Papua I yaitu pada Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Data Backlog Perumahan di BP3KP Papua I

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Backlog 1 Kepemilikan Rumah			Backlog Kualitas Rumah		
			Desil 1-4	Desil 5-8	Total	Desil 1-4	Desil 5-8	Total
1	Papua	Kota Jayapura	3,870	12,795	16,665	7,244	5,727	12,971
		Jayapura	453	1,206	1,659	2,514	6,181	8,695
		Keerom	1,106	1,777	2,883	3,870	2,853	6,723
		Sarmi	354	1,052	1,406	2,285	2,433	4,718
		Supiori	624	360	984	3,145	602	3,747
		Biak Numfor	2,080	4,084	6,164	8,663	6,560	15,223
		Kepulauan Yapen	1,331	2,538	3,869	6,038	4,983	11,021
		Waropen	830	545	1,375	4,250	2,117	6,367
		Mamberamo Raya	271	191	462	4,889	2,054	6,943
2	Papua Pegunungan	Jayawijaya	1,670	2,663	4,333	12,137	10,189	22,326
		Lanny Jaya	48	1,827	1,875	3,980	9,676	13,656
		Mamberamo Tengah	257	340	597	6,676	2,563	9,239
		Nduga	48	75	123	11,470	6,433	17,903
		Pegunungan Bintang	545	1,486	2,031	4,875	4,284	9,159
		Tolikara	10	386	396	450	6,106	6,556
		Yalimo	463	679	1,142	8,343	6,339	14,682
		Yahukimo	19,875	5,885	25,760	25,293	8,131	33,424
3	Papua Tengah	Nabire	2,546	4,219	6,765	6,765	6,413	13,178
		Dogiyai	290	585	875	7,192	8,743	15,935
		Paniai	6	86	92	1,597	2,403	4,000
		Puncak	185	168	353	18,759	9,237	27,996
		Puncak Jaya	425	809	1,234	6,569	9,237	15,806
		Intan Jaya	396	167	563	17,397	4,134	21,531
		Mimika	2,427	4,419	6,846	6,088	7,099	13,187
4	Papua Selatan	Merauke	2,527	8,064	10,591	6,987	12,303	19,290
		Boven Digoel	787	2,269	3,056	4,917	3,565	8,482
		Asmat	2,694	2,112	4,806	5,684	4,414	10,098
		Mappi	2,670	2,390	5,060	9,674	5,366	15,040
Total/Desil			48,788	63,177	111,965	207,751	160,145	367,896

Sumber: BPS Provinsi Papua

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN



RENCANA STRATEGIS

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PAPUA I**

TAHUN 2025-2029

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua I merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), khususnya di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam rangka mewujudkan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” dan sejalan dengan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - a) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - b) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - c) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - e) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - f) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 - g) Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - h) Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
 - i) Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni; dan
 - j) Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
2. Peningkatan kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator tujuan yaitu persentase peningkatan tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebagai unit pelaksana teknis bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau di wilayah Papua (Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan). Secara rinci, tujuan BP3KP Papua I adalah :

1. Peningkatan rumah layak huni di wilayah Papua melalui penyediaan perumahan;
2. Peningkatan rumah layak huni di wilayah Papua melalui peningkatan kualitas perumahan;
3. Peningkatan rumah layak huni di wilayah Papua melalui pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas;
4. Penanganan permukiman kumuh yang terpadu di wilayah Papua;
5. Pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan di wilayah Papua.

2.2 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Sasaran yang hendak dicapai selama 2025-2029 searah dengan sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari yakni:

1. Sasaran strategis (SS) 1, yaitu meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
2. Sasaran strategis (SS) 2, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut dijabarkan kedalam sasaran kegiatan di masing-masing unit kerja sebagai landasan BP3KP Papua I dalam menentukan sasaran program, yang dijabarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan pada Balai P3KP Papua I Tahun 2025-2029

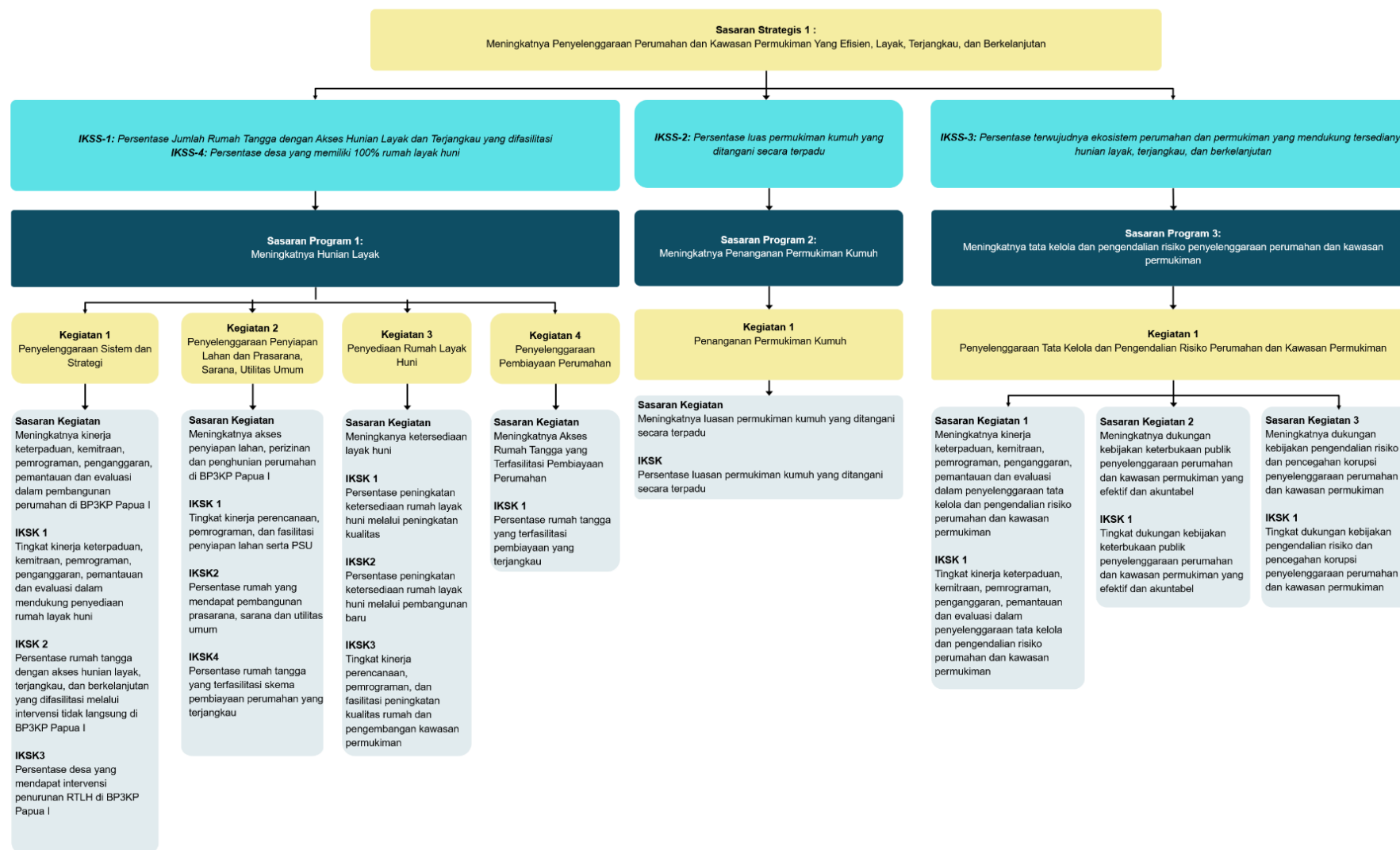
No	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKSK
1	Meningkatnya Hunian Layak	1. Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni 2. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I 3. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

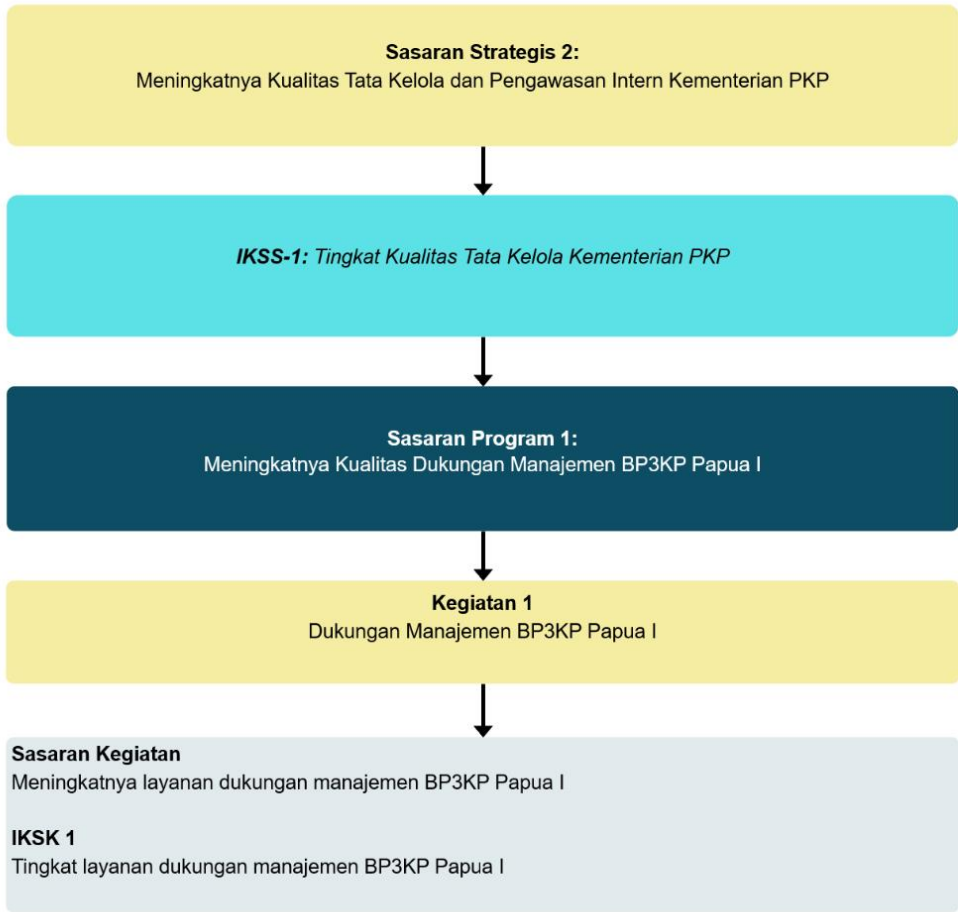
		2. Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU 2. Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum 3. Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal 4. Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau
		3. Penyediaan Rumah Layak Huni	Meningkatnya ketersediaan layak huni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas 2. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru 3. Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman
		4. Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau
2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	1. Penanganan Permukiman Kumuh	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
3	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman

			2. Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1. Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel
			3. Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
4	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	1. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	1. Tingkat layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Balai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kerja, yang tergambar pada Sasaran Kegiatan dan Pohon Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Sasaran Kegiatan BP3KP Papua I Tahun 2025-2029





BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



RENCANA STRATEGIS

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PAPUA I**

TAHUN 2025-2029

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi meliputi 5 (lima) unit organisasi yang memiliki garis koordinasi dan garis komando dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Berikut arah kebijakan dan strategi unit organisasi yang dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian:

1. Arah kebijakan dan strategi **Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman**, dilaksanakan melalui:
 - a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, yang dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - 2) Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - 3) Fasilitasi penyediaan lahan yang aman dan terjangkau; dan
 - 4) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada hunian tapak dan vertical.
 - b) Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, yang dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - 2) Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemangku kepentingan perumahan dan masyarakat; dan
 - 3) Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
 - c) Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, yang dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) Pendampingan dan penguatan pemerintah daerah dalam menyusun kelengkapan instrument perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu; dan
 - 2) Penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan dan proteksi kebakaran.
 - d) Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, yang diselenggarakan dengan menerapkan strategi:
 - 1) Peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan

- dalam penyelenggaraan perumahan;
- 2) Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 3) Pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
 - 4) Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
 - 5) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Arah kebijakan dan strategi **Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan**, dilaksanakan melalui:
- a) Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, yang dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
 - 2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - 3) Penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan di wilayah perdesaan;
 - 4) Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - 5) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agrarian.
 - b) Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:
 - 1) Pengembangan kerja sama dengan Lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
 - 2) Pengembangan skema tabungan berencana;
 - 3) Pengembangan bantuan tunai/*in-kind* yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
 - 4) Pengembangan skema kredit renovasi rumah dan kredit bangun rumah (KBR);
 - 5) Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
 - 6) Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (KPR FLPP), subsidi selisih bunga (SSB), dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perdesaan.

- c) Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:
 - 1) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahanperdesaan;
 - 2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - 3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - 5) Penguatan kelembagaan.
- 3. Arah kebijakan dan strategi **Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**, dilaksanakan melalui:
 - a) Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, melalui strategi:
 - 1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - 2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - 3) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - 4) Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
 - b) Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/badan usaha milik negara serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dan pendekatan kawasan terpadu seperti kawasan campuran dan kawasan TOD.
 - c) Mendorong pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
 - d) Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, melalui strategi:
 - 1) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - 2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi

- perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
- 3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - 5) Penguatan kelembagaan.
- e) Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan.
 - f) Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
 - g) Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
 - h) Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rumah susun, pelatihan pengelolaan rumah susun oleh penghuni, dan integrasi rumah susun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.
4. Arah kebijakan dan strategi **Direktorat Jenderal Tata Keloladan Pengendalian Risiko**, dilaksanakan melalui:
- a) Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat melalui strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
 - b) Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, melalui strategi:
 - 1) Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema pinjaman/hibah multilateral dan program perumahan hijau dan terjangkau di Indonesia (*Indonesia Green Affordable Housing*

- Program* atau IGAHP);
- 2) Melakukan koordinasi secara intensif dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain;
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) dan sistem antrean perumahan.
- c) Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan yang memerlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, melalui strategi:
- 1) *Risk*, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
 - 2) *Compliance*, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyusutan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - 3) *Financing*, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP, skema jaminan penyerapan (*off-take guarantee*); dan
 - 4) Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyediaan lahan.
5. Arah kebijakan dan strategi **Sekretariat Jenderal**, yang berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal melalui arah kebijakan ke depan difokuskan pada:
- a) Penguatan perencanaan dan penganggaran, melalui strategi:
 - 1) Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci berbasis data dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - 2) Integrasi antara perencanaan dan penganggaran dan peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
 - b) Transformasi digital dan tata kelola, melalui strategi:
 - 1) Transformasi digital dalam layanan administrasi kepegawaian pelayanan publik pengelolaan data dan informasi serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - 2) Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
 - c) Penguatan sumber daya manusia, melalui strategi:
 - 1) Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia berbasis analisis beban kerja dan kompetensi;
 - 2) Pengembangan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia diseluruh bidang fungsional termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi dan data.

- d) Penguatan sistem informasi dan data, melalui strategi:
 - 1) Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (*evidence-based policy*).
- e) Peningkatan layanan dukungan manajemen, melalui strategi:
 - 1) Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - 2) Penguatan layanan keamanan, ketertiban, ketertiban dan kehumasan secara profesional dan responsif.
- f) Modernisasi dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara, melalui strategi:
 - 1) Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik negara (BMN); dan
 - 2) Peningkatan akuntabilitas pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
- g) Penguatan sistem dan tata kelola pengadaan barang dan jasa, melalui strategi:
 - 1) Penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa dan sumber daya manusia di bidang pengadaan; dan
 - 2) Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem *e-procurement* untuk efisiensi dan transparansi.
- h) Penguatan komunikasi publik dan pelayanan publik, melalui strategi:
 - 1) Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
- i) Kolaborasi dan pendanaan alternatif, melalui strategi:
 - 1) Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan nonanggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - 2) Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta unit organisasi terkait, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Permukiman Papua I menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk periode Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan

akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai. Strategi yang ditempuh meliputi:

- Peningkatan kualitas layanan tata usaha, khususnya dalam pengelolaan kearsipan yang tertib dan modern, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
- Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik;
- Peningkatan kualitas tata kelola, perencanaan, pelaporan, pengendalian internal, dan manajemen risiko untuk memastikan layanan dukungan berjalan konsisten, akuntabel, dan terstandar.

2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Arah kebijakan ini difokuskan pada perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan secara terpadu.

Strategi yang antara lain:

- Percepatan pembangunan perumahan melalui penyediaan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
- Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya serta penyediaan sarana sanitasi yang layak;
- Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pada hunian tapak; serta
- Fasilitasi penyediaan lahan perumahan yang aman, legal, dan terjangkau.

3. Peningkatan Kualitas Permukiman Secara Terpadu

Arah kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan berdaya saing. Strategi yang ditempuh meliputi:

- Intervensi berbasis pada dokumen perencanaan dengan pendampingan dan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pemenuhan kelengkapan perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu;
- Penataan kawasan kumuh melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur kawasan permukiman, meliputi perumahan, jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, serta sistem proteksi kebakaran;
- Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan serta penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- Penguatan sistem pendataan serta monitoring dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- Pembinaan kepada pelaku usaha perumahan serta fasilitasi perlindungan konsumen di bidang perumahan; dan
- Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material bangunan guna mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

3.3 Kerangka Kelembagaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Struktur organisasi BP3KP Papua I ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

Dalam melaksanakan tugas BP3KP Papua I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuaapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.



Keterangan:
 ----- garis koordinasi
 ————— garis komando

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Sumber : PermenPKP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Struktur organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman secara langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Meskipun demikian, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki jalur koordinasi dengan unit kerja pusat lainnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I didukung oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha yang menangani tugas administratif dan kesekretariatan, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Kepala Seksi pelaksanaan wilayah II yang menjalankan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditentukan. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Papua I juga didukung oleh kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis maupun administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jabatan ini memainkan peran penting dalam operasionalisasi tugas-tugas harian di lapangan maupun di kantor, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab balai.

1. Kepala Balai

Kepala balai sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.

2. Sub bagian Umum dan Tata Usaha

Sub bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan Pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik serta layanan hukum Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.

3. Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas :

- a) Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen;
- b) Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah pesisir.

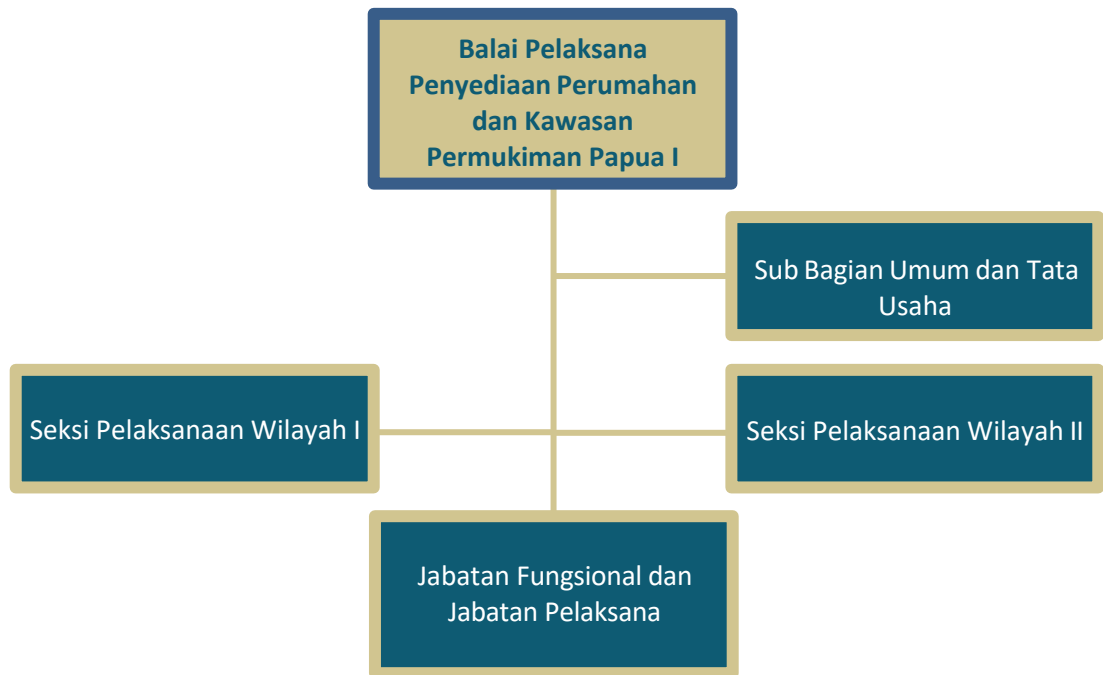
4. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan fungsional dan pelaksana mempunyai tugas dan fungsi secara teknis maupun administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.

Balai P3KP Papua I mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



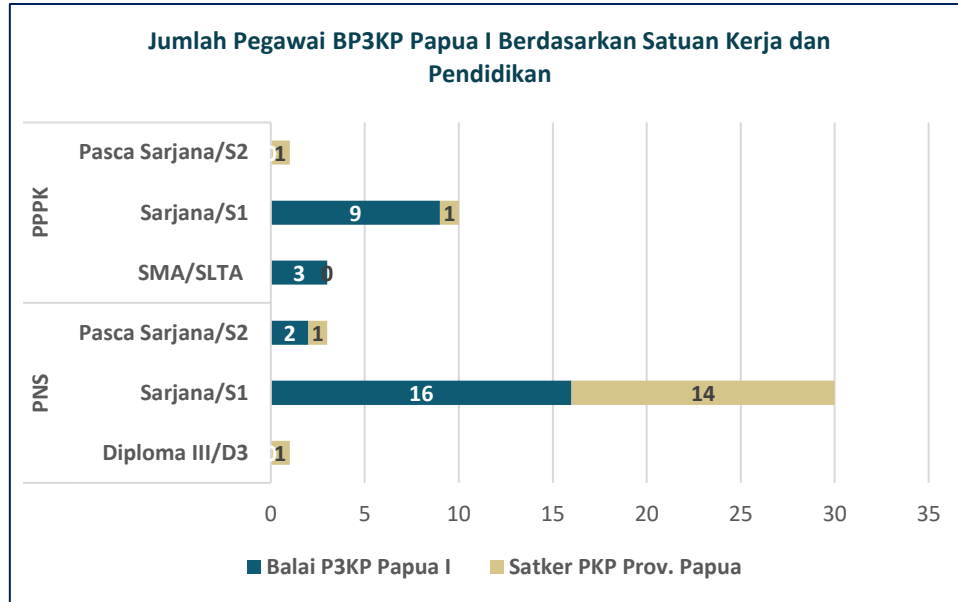
Gambar 3. 2 Bagan Struktur Organisasi BP3KP Papua I

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Papua (Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan) yaitu sejumlah 48 pegawai. Komposisi sumber daya manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I terdiri dari 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tabel 3. 1 Komposisi sumber daya manusia (SDM) di Balai P3KP Papua I

Penempatan	Total	Pegawai		Gender	
		PNS	PPPK	L	P
Balai P3KP Papua I	30	18	12	18	12
Satker PKP Provinsi Papua	18	16	2	14	4
Total	48	34	14	32	16

Komposisi sumber daya manusia (SDM) pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki latar belakang Pendidikan Pasca sarjana sebanyak 3 PNS dan 1 PPPK, lalu Sarjana sebanyak 30 PNS dan 10 PPPK serta pendidikan SMA/SLTA sebanyak 1 PNS dan 3 PPK yang dituangkan pada diagram berikut:



Gambar 3. 3 Diagram Pegawai BP3KP Papua I Berdasarkan Satuan Kerja dan Pendidikan

Pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I terdapat beberapa Jabatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memenuhi pelaksanaan setiap pekerjaan di Balai, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan pada BP3KP Papua I

No	Jabatan	Total	Pegawai	
			PNS	PPPK
1	Eselon 3	1	1	0
2	Eselon 4	3	3	0
3	JF PKP Ahli Madya	1	1	0
4	JF PKP Ahli Muda	1	1	0
5	JF PKP Ahli Pertama	17	13	4
6	JF Perencana Ahli Pertama	2	1	1
7	JF PKBG Ahli Pertama	9	8	1
8	JF APK APBN Ahli Pertama	2	2	0
9	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1
10	JF Analis Perumahan	1	1	0
11	JF TPL Ahli Pertama	1	0	1
12	JF TBP Ahli Pertama	3	0	3
16	Operator Layanan Operasional	1	0	1
17	Pengadministrasi Perkantoran	2	0	2
18	Penata Layanan Operasional	3	3	0
Total		48	34	14

BAB IV

TARGET KINERJA DAN

KERANGKA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PAPUA I**

TAHUN 2025-2029

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja BP3KP Papua I adalah target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh BP3KP Papua I yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, maupun program yang ada di BP3KP Papua I didasarkan kepada peraturan dan target kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui kriteria-kriteria diantaranya :

- Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran.
- Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas dan terukur. Pendekatan ini memastikan bahwa target kinerja yang ditetapkan bersifat realistis namun tetap mendorong peningkatan kinerja secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang periode Renstra Balai di tahun 2025-2029.

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Target Kinerja Balai P3KP Papua I Tahun 2025-2029

KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT	2025-2029
Meningkatnya Hunian Layak	
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	
Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan	13 Rekomendasi Kebijakan
Data dan Informasi	8 Dokumen
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	23 Laporan
Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Kegiatan
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	929 Unit
Dukungan Teknis	11 Dokumen
Kebijakan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian	4 Rekomendasi Kebijakan
Penyediaan Rumah Layak Huni	
Pembangunan Rumah Swadaya	93.162 Unit
Pembangunan Rumah Susun	748 Unit
Pembangunan Rumah Khusus	16.915 Unit
Pelaporan Dokumen Teknis	4 Laporan
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	8 Laporan
Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan	16 Rekomendasi Kebijakan
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	
Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	4 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	
Permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	55 Hektar
Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	4 Laporan
Pembangunan dan Penerapan Zona Integritas	5 Rekomendasi Kebijakan
Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP)	9 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	
Layanan Perkantoran	10 Layanan
Layanan Umum	34 Layanan
Layanan Sarana Internal	10 Layanan
Layanan Data dan Informasi	12 Layanan
Layanan BMN	8 Layanan
Layanan Reformasi Kinerja	8 Layanan

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan di BP3KP Papua I diperlukan dukungan kerangka pendanaan yang maksimal. Dalam melakukan perhitungan Pendanaan perlu memperhatikan antara lain:

- a. Alokasi pendanaan program adalah penjumlahan dari alokasi pendanaan kegiatan;
- b. Alokasi pendanaan kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi pendanaan output;
- c. Alokasi pendanaan output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target.

Untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 serta sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, serta untuk menjalankan berbagai program prioritas, yang mencakup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dan program dukungan manajemen, BP3KP Papua I memproyeksikan total indikasi kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 12.197.141.142.000,- (Dua Belas Triliun Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu). Rincian alokasi kebutuhan anggaran untuk mencapai target pembangunan tersebut diuraikan, sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Kerangka Pendanaan BP3KP Papua I

KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN 2025-2029 (Ribu Rp)
Meningkatnya Hunian Layak	
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	11,462,955
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	41,053,878
Penyediaan Rumah Layak Huni	11,649,929,401
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	368,545
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	124,175,000
Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	3,589,891
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	366,561,472
TOTAL	12,197,141,142

BAB V

PENUTUP



RENCANA STRATEGIS

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PAPUA I**

TAHUN 2025-2029

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis BP3KP Papua I Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan, Direktorat Jenderal tata Kelola dan pengendalian Resiko dan Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025 -2029 sebagai arahan kepada Kepala BP3KP Papua I dalam mengemban visi, misi dan sasaran yang harus dicapai.

Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka mendukung target nasional yaitu pembangunan dan renovasi 3 juta rumah yaitu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah baru layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai serta meningkatnya kepastian hukum dalam bermukim serta peningkatan kualitas perumahan.

Pencapaian sasaran target rencana strategis BP3KP Papua I Tahun 2025-2029 sangat memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan rakyat. Berbagai insentif diberikan oleh Pemerintah untuk mendorong swasta dan masyarakat membangun rumah yang layak huni, baik melalui pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, maupun melalui bantuan stimulan perumahan swadaya.

Melalui pelaksanaan Rencana Strategis BP3KP Papua I Tahun 2025-2029 secara konsisten serta keterlibatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat secara bergotong-royong dalam mewujudkan program nasional 3 juta rumah maka penyediaan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan rakyat sangat diperlukan.

Evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pemantauan berkala atas progres program dan kegiatan dengan melakukan monitoring evaluasi

(monev) secara triwulan, pengukuran capaian menggunakan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator program/kegiatan sesuai target yang tertuang dalam dokumen perencanaan, analisis kesenjangan antara rencana dan realisasi, penilaian efektivitas serta efisiensi pemanfaatan sumber daya yaitu pemanfaatan anggaran dan SDM, dan evaluasi kualitatif terhadap koordinasi, tata kelola, serta relevansi strategi dengan kondisi aktual; seluruh hasil evaluasi kemudian dirangkum dalam laporan kinerja/LAKIP untuk diolah menjadi rekomendasi perbaikan yang akan digunakan sebagai dasar penyesuaian kebijakan, peningkatan kualitas implementasi, serta penyempurnaan perencanaan strategis periode berikutnya.

Rencana strategis ini tidak bersifat kaku dan selalu terbuka untuk disempurnakan, sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagai suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap lingkungan strategis yang dinamis.

LAMPIRAN



RENCANA STRATEGIS

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PAPUA I**

TAHUN 2025-2029

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan

NO	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target					Total	Anggaran (Rp. Ribu)					Total
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan														
SP.1	Meningkatnya Hunian Layak													
KEGIATAN 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi														
SK.1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I													
1	Jumlah laporan penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	50,000.00	200,000.00	210,800.00	222,183.20	234,181.09	917,164.29
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	70,000.00	73,780.00	77,764.12	81,963.38	303,507.50
3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	2	-	-	-	-	2	107,316.55	-	-	-	-	107,316.55

Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 BP3KP Papua I

NO	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target					Total	Anggaran (Rp. Ribu)					Total
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	32,631.58	34,393.68	36,250.94	38,208.49	141,484.68
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	395,556.00	-	-	-	-	395,556.00
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	560,706.00	590,984.12	622,897.27	656,533.72	2,431,121.11
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	247,380.00	260,738.52	274,818.40	289,658.59	1,072,595.51
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	1	2	2	2	2	9	164,410.00	942,630.00	993,532.02	1,047,182.75	1,103,730.62	4,251,485.39
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	190,000.00	200,260.00	211,074.04	222,472.04	823,806.08

Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 BP3KP Papua I

NO	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target					Total	Anggaran (Rp. Ribu)					Total
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	2	2	2	2	8	-	235,000.00	247,690.00	261,065.26	275,162.78	1,018,918.04
KEGIATAN 2 : Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum														
SK.2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I													
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	221	177	177	177	177	929	15,691,000.00	2,594,277.37	2,697,635.04	2,821,664.23	2,987,036.50	26,791,613.14
2	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3	-	-	89,078.00	93,888.21	98,958.18	281,924.39
3	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	2,899,352.00	3,055,917.01	3,220,936.53	3,394,867.10	12,571,072.63
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	220,029.00	231,910.57	244,433.74	257,633.16	954,006.46
5	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	105,000.00	110,670.00	116,646.18	122,945.07	455,261.25

Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 BP3KP Papua I

NO	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target					Total	Anggaran (Rp. Ribu)					Total
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	perumahan perkotaan													
KEGIATAN 3 : Penyediaan Rumah Layak Huni														
SK.3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni													
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya	Unit	926	23,059	23,059	23,059	23,059	93,162	31,484,000.00	558,200,742.50	586,044,485.00	613,888,227.50	641,731,970.00	2,431,349,425.00
2	Jumlah Rumah Khusus yang terbangun	Unit	35	4,220	4,220	4,220	4,220	16,915	23,450,000.00	1,818,586,319.22	1,873,053,844.76	1,962,045,090.77	2,051,036,336.79	7,728,171,591.54
3	Jumlah Rumah Susun yang terbangun	Unit	220	132	132	132	132	748	440,000,000.00	248,493,275.95	250,575,600.00	261,940,800.00	273,306,000.00	1,474,315,675.95
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	88,750.00	93,542.50	98,593.80	103,917.86	384,804.15
5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	2	-	-	-	-	2	13,156.46	-	-	-	-	13,156.46
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	814,999.00	859,008.95	905,395.43	954,286.78	3,533,690.16

Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 BP3KP Papua I

NO	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target					Total	Anggaran (Rp. Ribu)					Total
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	perumahan perdesaan													
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	507,000.00	534,378.00	563,234.41	593,649.07	2,198,261.48
8	Jumlah Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	810,000.00	853,740.00	899,841.96	948,433.43	3,512,015.39
9	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	2	-	-	-	-	2	1,778,500.00	-	-	-	-	1,778,500.00
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	120,000.00	126,480.00	133,309.92	140,508.66	520,298.58
11	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	957,600.00	1,009,310.40	1,063,813.16	1,121,259.07	4,151,982.63

Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 BP3KP Papua I

NO	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target					Total	Anggaran (Rp. Ribu)					Total
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN 4 : Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan														
SK.1 Meningkatkan Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan														
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	85,000	89,590	94,428	99,527	368,545
SP.2 Meningkatkan Penanganan Permukiman Kumuh														
SK.1 Meningkatkan Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu														
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Ha	-	15	20	-	20	55.00	-	31,575,000	44,200,000	-	48,400,000	124,175,000
SP.3 Meningkatkan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman														
KEGIATAN 1 : Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman														
SK.1 Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman														
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	52,600	75,000	100,000	125,000	352,600

Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 BP3KP Papua I

NO	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target					Total	Anggaran (Rp. Ribu)					Total
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel													
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	129,232	182,150	200,365	220,410	242,451	974,608
SK.3	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman													
1	Jumlah penerapan Manajemen Risiko Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	174,233	225,000	247,500	272,500	299,475	1,218,458
2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	225,000	247,500	272,250	299,475	1,044,225
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman														

Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 BP3KP Papua I

NO	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target					Total	Anggaran (Rp. Ribu)					Total
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
SP.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I													
KEGIATAN : Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I														
SK.1	Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I													
1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2	10	27,952,547	76,523,147	80,349,304	84,366,769	88,585,107	357,776,874
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2	10	45,675	149,400	156,870	164,714	172,949	689,608
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	0	2	2	2	2	8	0	244,000	257,176	271,064	285,701	1,057,940
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	0	2	2	2	2	8	0	264,000	278,256	293,282	309,119	1,144,657
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	0	2	2	2	2	8	0	205,000	216,070	227,738	240,036	888,843
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2	10	65,826	696,954	731,802	768,392	806,812	3,069,786
7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	18,900	19,921	20,996	22,130	81,947
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	15,597	16,439	17,327	18,263	67,626
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	85,000	89,590	94,428	99,527	368,545

Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 BP3KP Papua I

NO	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target					Total	Anggaran (Rp. Ribu)					Total
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	41,500	43,741	46,103	48,593	179,937
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	85,000	89,590	94,428	99,527	368,545
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	0	2	2	2	2	8	-	200,000	210,800	222,183	234,181	867,164

Lampiran II.

METODE PERHITUNGAN BP3KP PAPUA I

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS 1:					
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan					
SASARAN PROGRAM 1:					
Meningkatnya Hunian Layak					
Kegiatan 1:					
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SK 1 Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	IKSK 1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 1 Jumlah laporan penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dihitung dari realisasi Jumlah laporan penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi laporan penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 Rekomendasi Kebijakan 2026: 1 Rekomendasi Kebijakan 2027: 1 Rekomendasi Kebijakan 2028: 1 Rekomendasi Kebijakan 2029: 1 Rekomendasi Kebijakan Total : 5 Rekomendasi Kebijakan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		<p>OK 2 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Dokumen 2028 : 1 Dokumen 2026: 1 Dokumen 2029 : 1 Dokumen 2027: 1 Dokumen Total : 4 Dokumen</p>	Non Kumulatif	Internal
		<p>OK 3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 Laporan 2028: - Laporan 2026: - Laporan 2029: - Laporan 2027: - Laporan Total : 2 Laporan</p>	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		<p>OK 4 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Laporan 2028: 1 Laporan 2026: 1 Laporan 2029: 1 Laporan 2027: 1 Laporan Total : 4 Laporan</p>	Non Kumulatif	Internal
		<p>OK 5 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 Kegiatan 2028: 0 Kegiatan 2026: - Kegiatan 2029: 0 Kegiatan 2027: - Kegiatan Total : 1 Kegiatan</p>	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		<p>OK 6 Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Rekomendasi Kebijakan 2026: 1 Rekomendasi Kebijakan 2027: 1 Rekomendasi Kebijakan 2028: 1 Rekomendasi Kebijakan 2029: 1 Rekomendasi Kebijakan Total: 4 Rekomendasi Kebijakan</p>	Non Kumulatif	Internal
		<p>OK 7 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Dokumen 2028 : 1 Dokumen 2026: 1 Dokumen 2029: 1 Dokumen 2027: 1 Dokumen Total : 4 Dokumen</p>	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		<p>OK 8 Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 Laporan 2028: 2 Laporan 2026: 2 Laporan 2029: 2 Laporan 2027: 2 Laporan Total : 9 Laporan</p>	Non Kumulatif	Internal
		<p>OK 9 Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi Rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaandi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Rekomendasi Kebijakan 2026: 1 Rekomendasi Kebijakan 2027: 1 Rekomendasi Kebijakan 2028: 1 Rekomendasi Kebijakan 2029: 1 Rekomendasi Kebijakan Total : 4 Rekomendasi Kebijakan</p>	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		OK 10 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Laporan 2028: 2 Laporan 2026: 2 Laporan 2029: 2 Laporan 2027: 2 Laporan Total : 8 Laporan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum					
SK 1 Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	IKSK 1 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 221 Unit 2028: 177 Unit 2026: 177 Unit 2029: 177 Unit 2027: 177 Unit Total: 929 Unit	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	IKSK 3 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	OK 3 Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Dokumen 2028: 1 Dokumen 2026: - Dokumen 2029: 1 Dokumen 2027: 1 Dokumen Total : 3 Dokumen</p>	Non Kumulatif	Internal
		OK 4 Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Dokumen 2028: 1 Dokumen 2026: 1 Dokumen 2029: 1 Dokumen 2027: 1 Dokumen Total : 4 Dokumen</p>	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		<p>OK 5 Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Dokumen 2028: 1 Dokumen 2026: 1 Dokumen 2029: 1 Dokumen 2027: 1 Dokumen Total : 4 Dokumen</p>	Non Kumulatif	Internal
		<p>OK 6 Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Rekomendasi Kebijakan 2026: 1 Rekomendasi Kebijakan 2027: 1 Rekomendasi Kebijakan 2028: 1 Rekomendasi Kebijakan 2029: 1 Rekomendasi Kebijakan Total: 4 Rekomendasi Kebijakan</p>	Non Kumulatif	Internal

Kegiatan 3:
Penyediaan Rumah Layak Huni

Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 BP3KP Papua I

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
SK 1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	IKSK 1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1 Jumlah unit rumah swadaya (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah unit rumah swadaya oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 926 Unit 2028: 23.059 Unit 2026: 23.059 Unit 2029: 23.059 Unit 2027: 23.059 Unit Total: 93.162 Unit</p>	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 2 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2 Jumlah rumah khusus yang terbangun (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi Jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 35 Unit 2028: 4.220 Unit 2026: 4.220 Unit 2029: 4.220 Unit 2027: 4.220 Unit Total: 16.915 Unit</p>	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah rumah susun yang terbangun (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi rumah susun yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 220 Unit 2028: 132 Unit 2026: 132 Unit 2029: 132 Unit 2027: 132 Unit Total: 748 Unit</p>	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	IKSK 3 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	OK 4 Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Laporan 2028: 1 Laporan 2026: 1 Laporan 2029: 1 Laporan 2027: 1 Laporan Total: 4 Laporan</p>	Non Kumulatif	Internal
		OK 5 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	<p>Dihitung dari realisasi Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 Laporan 2028: - Laporan 2026: - Laporan 2029: - Laporan 2027: - Laporan Total: 2 Laporan</p>	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		<p>OK 6 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Laporan 2028: 1 Laporan 2026: 1 Laporan 2029: 1 Laporan 2027: 1 Laporan Total: 4 Laporan</p>	Non Kumulatif	Internal
		<p>OK 7 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Rekomendasi Kebijakan 2026: 1 Rekomendasi Kebijakan 2027: 1 Rekomendasi Kebijakan 2028: 1 Rekomendasi Kebijakan 2029: 1 Rekomendasi Kebijakan Total: 4 Rekomendasi Kebijakan</p>	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		<p>OK 8 Jumlah Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Rekomendasi Kebijakan 2026: 1 Rekomendasi Kebijakan 2027: 1 Rekomendasi Kebijakan 2028: 1 Rekomendasi Kebijakan 2029: 1 Rekomendasi Kebijakan Total: 4 Rekomendasi Kebijakan</p>	Non Kumulatif	Internal
		<p>OK 9 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 Laporan 2028: - Laporan 2026: - Laporan 2029: - Laporan 2027: - Laporan Total: 2 Laporan</p>	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		<p>OK 10 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Rekomendasi Kebijakan 2026: 1 Rekomendasi Kebijakan 2027: 1 Rekomendasi Kebijakan 2028: 1 Rekomendasi Kebijakan 2029: 1 Rekomendasi Kebijakan Total: 4 Rekomendasi Kebijakan</p>	Non Kumulatif	Internal
		<p>OK 11 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Rekomendasi Kebijakan 2026: 1 Rekomendasi Kebijakan 2027: 1 Rekomendasi Kebijakan 2028: 1 Rekomendasi Kebijakan 2029: 1 Rekomendasi Kebijakan Total: 4 Rekomendasi Kebijakan</p>	Non Kumulatif	Internal

Kegiatan 4:
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
SK 1 Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	IKSK 1 Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau	OK 1 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Rekomendasi Kebijakan 2026: 1 Rekomendasi Kebijakan 2027: 1 Rekomendasi Kebijakan 2028: 1 Rekomendasi Kebijakan 2029: 1 Rekomendasi Kebijakan Total: 4 Rekomendasi Kebijakan</p>	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh					
Kegiatan 1: Penanganan Permukiman Kumuh					
SK 1 Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	IKSK 1 Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	OK 1 Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (<i>Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan</i>)	<p>Dihitung dari realisasi Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Ha 2028: - Ha 2026: 15 Ha 2029: 20 Ha 2027: 20 Ha Total: 55 Ha</p>	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman					

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
<p>SK 1 Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman</p>	<p>IKSK 1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman</p>	<p>OK 1 Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Laporan 2028: 1 Laporan 2026: 1 Laporan 2029: 1 Laporan 2027: 1 Laporan Total: 4 Laporan</p>	Non Kumulatif	Internal
<p>SK 2 Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel</p>	<p>IKSK 2 Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel</p>	<p>OK 1 Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas</p>	<p>Dihitung dari realisasi Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Capaian = Jumlah Realisasi pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 Rekomendasi Kebijakan 2026: 1 Rekomendasi Kebijakan 2027: 1 Rekomendasi Kebijakan 2028: 1 Rekomendasi Kebijakan 2029: 1 Rekomendasi Kebijakan Total: 5 Rekomendasi Kebijakan</p>	Non Kumulatif	Internal

Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 BP3KP Papua I

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
SK 3 Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 3 Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	OK 1 Jumlah penerapan Manajemen Risiko	Dihitung dari realisasi Jumlah penerapan Manajemen Risiko oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 Rekomendasi Kebijakan 2026: 1 Rekomendasi Kebijakan 2027: 1 Rekomendasi Kebijakan 2028: 1 Rekomendasi Kebijakan 2029: 1 Rekomendasi Kebijakan Total: 5 Rekomendasi Kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Dihitung dari realisasi Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Rekomendasi Kebijakan 2026: 1 Rekomendasi Kebijakan 2027: 1 Rekomendasi Kebijakan 2028: 1 Rekomendasi Kebijakan 2029: 1 Rekomendasi Kebijakan Total: 4 Rekomendasi Kebijakan		
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN					
SASARAN STRATEGIS 2:					
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
SASARAN PROGRAM 1:					
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I					
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I					

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
SK 1 Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	IKSK 1 Tingkat layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	OK 1 Jumlah Layanan Perkantoran (<i>Sekretariat Jenderal</i>)	Dihitung dari realisasi Jumlah Layanan Perkantoran oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi Layanan Perkantoran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 Layanan 2028: 2 Layanan 2026: 2 Layanan 2029: 2 Layanan 2027: 2 Layanan Total: 10 Layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah Layanan Umum (<i>Sekretariat Jenderal</i>)	Dihitung dari realisasi Jumlah Layanan Umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi Layanan Umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 Layanan 2028: 2 Layanan 2026: 2 Layanan 2029: 2 Layanan 2027: 2 Layanan Total: 10 Layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah Layanan Umum (<i>Ditjen Kawasan Permukiman</i>)	Dihitung dari realisasi Jumlah Layanan Umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi Layanan Umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Layanan 2028: 2 Layanan 2026: 2 Layanan 2029: 2 Layanan 2027: 2 Layanan Total: 8 Layanan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		OK 4 Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perdesaan)</i>	Dihitung dari realisasi Jumlah Layanan Umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi Layanan Umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Layanan 2028: 2 Layanan 2026: 2 Layanan 2029: 2 Layanan 2027: 2 Layanan Total: 8 Layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5 Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi Jumlah Layanan Umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi Layanan Umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Layanan 2028: 2 Layanan 2026: 2 Layanan 2029: 2 Layanan 2027: 2 Layanan Total: 8 Layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6 Jumlah Layanan Sarana Internal <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi Jumlah Layanan Sarana Internal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi Layanan Sarana Internal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 Layanan 2028: 2 Layanan 2026: 2 Layanan 2029: 2 Layanan 2027: 2 Layanan Total: 10 Layanan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		OK 7 Jumlah Layanan Data dan Informasi <i>(Ditjen Kawasan Permukiman)</i>	Dihitung dari realisasi Jumlah Layanan Data dan Informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi Layanan Data dan Informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Layanan 2028: 1 Layanan 2026: 1 Layanan 2029: 1 Layanan 2027: 1 Layanan Total: 4 Layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 8 Jumlah Layanan Data dan Informasi <i>(Ditjen Kawasan Perdesaan)</i>	Dihitung dari realisasi Jumlah Layanan Data dan Informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi Layanan Data dan Informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Layanan 2028: 1 Layanan 2026: 1 Layanan 2029: 1 Layanan 2027: 1 Layanan Total: 4 Layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 9 Jumlah Layanan Data dan Informasi <i>(Ditjen Kawasan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi Jumlah Layanan Data dan Informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi Layanan Data dan Informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Layanan 2028: 1 Layanan 2026: 1 Layanan 2029: 1 Layanan 2027: 1 Layanan Total: 4 Layanan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		OK 10 Jumlah Layanan BMN <i>(Ditjen Kawasan Permukiman)</i>	Dihitung dari realisasi Jumlah Layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi Layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Layanan 2028: 1 Layanan 2026: 1 Layanan 2029: 1 Layanan 2027: 1 Layanan Total: 4 Layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 11 Jumlah Layanan BMN <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi Jumlah Layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi Layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Layanan 2028: 1 Layanan 2026: 1 Layanan 2029: 1 Layanan 2027: 1 Layanan Total: 4 Layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 12 Jumlah Layanan Reformasi Kinerja <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi Jumlah Layanan Reformasi Kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Capaian = Jumlah Realisasi Layanan Reformasi Kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - Layanan 2028: 2 Layanan 2026: 2 Layanan 2029: 2 Layanan 2027: 2 Layanan Total: 8 Layanan	Non Kumulatif	Internal



**Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Papua I**

Renstra 2025-2029